



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KEMENTERIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETYA UTAMA
2. Jabatan : SEKRETARIS KEMENTERIAN
3. NHK : 139772

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	9.800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/350 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI	Rp. 2.500.000.000	
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/217 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI	Rp. 2.900.000.000	
3. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/205 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI	Rp. 2.200.000.000	
4. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI	Rp. 2.200.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	926.000.000
1. MOTOR, VESPA LX-125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp. 26.000.000	
2. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp. 260.000.000	
3. MOBIL, NISSAN SERENA Tahun 2024, HASIL SENDIRI	Rp. 640.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	52.424.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	204.500.475
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	10.982.924.475



III. HUTANG

Rp. 469.157.870

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.513.766.605

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.